

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang baik digadang-gadang menjadi kunci sukses bisnis di abad 21 (Noviyanti, 2017, Kompas.com). Nyatanya penerapan *good corporate governance* (GCG) yang buruk disinyalir sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1997. Beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, dan Xerox menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG dengan baik ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) oleh perusahaan di Indonesia. Pasalnya penerapan GCG di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN (Primadhyta, 2017, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN *Corporate Governance Awards* 2015. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. "Pencapaian Indonesia ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura delapan emiten dan Malaysia enam emiten. Besar harapan saya bahwa akan banyak lagi emiten-emiten Indonesia yang mampu menembus Top 50 ASEAN Companies pada ajang ASEAN *Corporate Governance Awards* berikutnya," tutur Wimboh (Primadhyta, 2017, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Setiap perusahaan terbuka (emiten) wajib menjalankan GCG karena perusahaan menjadi milik publik, sehingga publik harus mengetahui dengan transparan segala aktivitas perusahaan dan keuangan perusahaan (Admin, 2017, [www.jelasberita.com](http://www.jelasberita.com)). OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /Pojk.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Seojk.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 aspek tata kelola perusahaan terbuka meliputi (SEOJK No.32/ SEOJK.04/ 2015):

- a. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
- b. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;
- c. Fungsi dan Peran Direksi;
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
- e. Keterbukaan Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa (POJK No.21/ POJK.04/ 2015):

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memiliki organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (UU RI No.40 Tahun 2007, 2007). Lebih lanjut, dalam keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan bahwa setiap perusahaan yang tercatat di BEI, wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selain itu, organ lain yang juga wajib dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di BEI adalah Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan (Admin, 2017, [www.jelasberita.com](http://www.jelasberita.com)).

Berdasarkan laporan terhadap terjadinya kasus skandal keuangan perusahaan seperti Enron, Global Crossing, Tyco, dan World Com mengatakan bahwa dewan direksi dan komite-komite tidak memiliki pengawasan yang baik terhadap pengelolaan perusahaan (Al-Matari, Al-Swidi, Fadzil, & Al-Matari, 2012:241). Begitu pula di Indonesia dengan contoh kasus skandal keuangan PT. Great River International Tbk, yang menyimpannya seperti gagal bayar hutang dan kesulitan arus kas. Terjadinya hal ini sebagai akibat dari kurang berfungsinya organ-organ perusahaan seperti dewan komisaris dan audit internal sebagai pengawas intern perusahaan (Bachtiar dalam Dahlan, 2015:133). Hal senada juga diungkapkan Nurhaida (Ketua Bapepam-LK) bahwa beberapa pelanggaran, salah satunya pengangsuran dana cadangan PT Elnusa Tbk yang disimpan di PT Bank Mega Tbk berupa dana simpanan deposito berjangka sebesar Rp 111 miliar disebabkan lemahnya komite pengawas internal perusahaan (Taufik, 2011).

Salah satu kasus manipulasi umum lainnya yaitu manajemen laba yang dilakukan dengan mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkannya. Dibutuhkan penerapan GCG yang efektif untuk mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan manajemen laba (Makhrus, 2017:54).

Kinerja perusahaan adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja (Makhrus, 2017:57). Berdasarkan tujuan analisis, penilaian kinerja perusahaan dapat dibedakan menjadi perspektif internal dan eksternal. Ditinjau dari perspektif internal, penilaian kinerja secara periodik memungkinkan manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi dalam menilai implementasi strategi perusahaan di masa yang akan datang (Umar, 2002:88). Sedangkan ditinjau dari perspektif eksternal, perusahaan yang mempunyai kinerja baik akan terjamin kelangsungan hidupnya karena mendapatkan kepercayaan dari publik/investor, sehingga membuat publik merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Syafiqurrahman, Andiarsyah, & Suciningsih, 2014:22). Hal senada diungkapkan oleh Sampurno & Lestari (2017:1) bahwa kinerja perusahaan merupakan bagian penting dalam pengukuran keberhasilan perusahaan karena menjadi hal awal yang akan dilihat oleh seorang investor.

Informasi mengenai perusahaan yang memiliki kinerja baik bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti pemegang saham, investor, pekerja dan konsumen (Sampurno & Lestari, 2017:2). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain *Good Corporate Governance* (Dani dan Hasan dalam Wati, 2012:2). Menurut Effendi (2009:9) salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

implementasi GCG adalah dewan direksi. Dewan direksi menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU RI No.40 Tahun 2007, 2007). Pernyataan serupa diberikan Wulandari dan Budiarta (2014:575) yang mengatakan bahwa keberadaan dewan direksi diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan dalam hal pencapaian GCG. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberi manfaat pada kinerja perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan kelangsungan perusahaan (Widyati, 2013:239). Lebih lanjut, Widyati (2013:239) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi, koordinasi, dan tindakan yang lebih baik antara para direktur dalam mengatasi masalah.

Salah satu komponen penting lainnya dalam keberhasilan pelaksanaan GCG adalah adanya komite audit yang berkualitas (Makhrus, 2017:54). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Widyati, 2013:238). Fungsi pengawasan yang dimaksud menurut Makhrus (2017:54) berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas fungsi audit. Selain itu,

keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada pemegang saham dan stakeholder (Makhrus, 2017:55).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barka dan Legendre (2017) menggunakan 4 variabel untuk menguji pengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu *Chief Executive Officer (CEO) power, External Shareholders, Independent Directors, and Audit Committee (AC) diligence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CEO* dan *External Shareholders* memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan tercermin secara jelas dengan tingginya kinerja perusahaan. Begitu pula dengan *Independent Directors* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan *Audit Committee* yang sepenuhnya independen dan sering mengadakan rapat cenderung memiliki pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Makhrus (2017) menggunakan satu variabel untuk menguji pengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu komite audit dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Hasil riset menyatakan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan dan manajemen laba. Manajemen laba juga tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari, *et al* (2012) menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja

perusahaan di Arab Saudi. Terdapat 6 variabel yang digunakan sebagai pengujian dengan variabel control *Firm Size* dan *Leverage* dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari, yaitu *Board Composition*, *CEO duality*, *Board Size*, *Audit Committee (AC) Independence*, *AC Activity* dan *AC Size*. Hasil penelitian menunjukkan hanya ukuran komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan tetapi dengan arah negatif, sementara variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif.

Berdasarkan uraian di atas dan penilaian terdahulu, penulis menilai masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu penelitian terhadap kinerja perusahaan yang tergolong sedikit di Indonesia didukung saran dari penelitian sebelumnya Zhou (2018) yang mengatakan bahwa perlu dilakukan penelitian mengenai relasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan di negara berkembang menjadi alasan penulis untuk meneliti kembali terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Al-Matari, *et al* (2012) yang berjudul "*Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies*". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan replikasi dari penelitian Matari, *et al* (2012) karena penelitian terhadap kinerja perusahaan yang tergolong sudah lama di Indonesia. Replikasi penelitian adalah pengulangan kembali perlakuan yang sama dalam suatu percobaan dengan kondisi yang sama untuk memperoleh ketelitian yang lebih tinggi (Andriani, Setyanto, & Kusuma, 2017:166). Periode data tahunan pada penelitian ini dilakukan dari tahun 2014-2017. Sedangkan subjek penelitian adalah semua perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI dan tidak bergerak dalam sektor keuangan dan perbankan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komposisi dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *CEO duality* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah independensi komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah aktivitas komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
6. Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
7. Apakah dewan direksi (komposisi, *CEO duality*, ukuran) dan komite audit (independensi, aktivitas, ukuran) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara komposisi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh negatif antara *CEO duality* terhadap kinerja perusahaan.
3. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh negatif antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
4. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara independensi komite audit terhadap kinerja perusahaan.
5. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara aktivitas komite audit terhadap kinerja perusahaan.
6. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan.
7. Menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh dewan direksi (komposisi, *CEO duality*, ukuran) dan komite audit (independensi, aktivitas, ukuran) secara simultan terhadap kinerja perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan seperti akademisi dan praktisi.

##### 1) Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap ilmu akuntansi khususnya terkait dengan *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.

##### 2) Praktisi

###### - Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan terkait hasil penerapan *good corporate governance*, khususnya berkaitan dengan dewan direksi dan komite audit.

###### - Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi, terutama berkaitan dengan pencapaian komite audit dan dewan direksi dalam penerapan *good corporate governance*.